

INDUSTRIALISASI DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 1992-2007 (A CASE STUDY OF PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG)

Tita Agustini, Retno Winarni

Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember

Email: tita_lmj@yahoo.com, 085746302057

ABSTRACT

This article discusses the industrialization process in the Pasuruan Regency, especially Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). The main issues to be dealt with here are the history of PIER, its conditions during the period of 1992-2007 and the impact of PIER on the regency government and local society. Data which are consulted to support the argument of the article include books, research reports, field survey data, and interviews. The results of the data analysis show that the establishment of PIER bring positive impacts both on the society and the local government. For the society, the positive impact took the form of new economic centers, employment opportunities and urban development. For the Local government, the establishment of PIER provided a source of income coming from taxes and other forms of revenues.

Keywords: industrialization, changes, PIER

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang proses industrialisasi di Kabupaten Pasuruan, utamanya Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah sejarah berdirinya kawasan industri PIER, bagaimana kondisi kawasan PIER dari tahun 1992-2007 dan dampak adanya industri PIER terhadap masyarakat dan Pemda. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data-data hasil studi pustaka berupa buku, laporan, terbitan khusus, survey lapangan, dan wawancara. Adapun hasil dari analisis data adalah kenyataan bahwa keberadaan kawasan industri PIER berdampak positif baik terhadap masyarakat sekitar kawasan PIER khususnya maupun masyarakat Pasuruan pada umumnya serta terhadap Pemerintah daerah setempat. Dampak terhadap masyarakat adalah munculnya pusat-pusat ekonomi baru, terserapnya tenaga kerja dan perkembangan kota. Sementara dampak bagi Pemerintah daerah adalah peningkatan PAD, baik dari sektor pajak maupun sektor yang lain.

Kata Kunci: industrialisasi, perubahan, PIER

1. Pendahuluan

Secara umum sejak dulu Indonesia tergolong negara agraris, namun demikian Indonesia juga memperhatikan sektor industri. Pengembangan industri pada zaman kolonial tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial untuk mendorong perkembangan industri di Hindia Belanda. (Both, 1987: 7) Dalam rangka menunjang kebijakan tersebut pemerintah menyediakan kredit, informasi mengenai pasar, penyuluhan dan bantuan teknis pada industri kecil untuk mencegah persaingan domestik (Thee, 1994:13). Akibatnya pada dasawarsa 1930-an sektor industri modern di

Indonesia berkembang pesat (Burger, 1975: 123). Sayangnya kemajuan sektor industri ini tidak dilanjutkan ketika Indonesia merdeka. Hal ini berlangsung sampai tahun 1960-an karena pemimpin disibukkan oleh masalah politik. Sektor industri baru diperhatikan lagi ketika masa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan tentang industri bahkan ditetapkan dalam GBHN dan dirumuskan setiap 5 tahun sekali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Laju perkembangan ekonomi Indonesia bangkit pada dasawarsa tahun 1980-an. Hal itu

terbukti ekspor hasil-hasil industri melonjak dengan sangat pesat sejak tahun 1989. Kemajuan tersebut jika dibandingkan dengan sektor industri manufaktur negara industri baru Asia Timur dan beberapa negara di ASEAN bisa dikatakan masih jauh. Hal itu disebabkan oleh karena proses industrialisasi di Indonesia baru dimulai secara serius sejak Pelita I (Thee, 1994: 9) Oleh karena itu Indonesia berusaha terus mengejar ketertinggalan tersebut dengan cara menyebarkan industri ke beberapa wilayah, salah satunya Propinsi Jawa Timur.

Kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur dibagi menjadi 3, yaitu pokok-pokok arahan kebijaksanaan pembangunan, pokok-pokok arahan fungsi kawasan dan pokok-pokok arahan struktur ruang wilayah (Pemkab Pasuruan, 2004:4-5) Tindak lanjut dari kebijakan tersebut pembangunan industri dilanjutkan ke beberapa kabupaten seperti Sidoarjo, Surabaya, Jombang dan Pasuruan. Kawasan industri yang berada di Sidoarjo adalah Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB) dengan luas 87 ha, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya dengan luas lahan 245 ha oleh pemerintah Kota Madya Surabaya serta Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Pasuruan Jawa Timur yang merupakan kawasan paling luas di antara ketiga kawasan tersebut. (http://pier.pasuruan.blogspot.com/2011/02/visi-dan-misi_23.html, diunduh pada 19 Oktober 2012)

Pasuruan, selain Industrial Estate Rembang (PIER), juga memiliki industri kecil dan menengah yang berpotensi terhadap perkembangan perekonomian Pasuruan, misalnya industri mebel, industri cor logam, industri batik, industri bidang pengolahan hasil pertanian dan industri makanan. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana proses industrialisasi di Pasuruan utamanya yang berkaitan dengan Pasuruan Industrial Estate Rembang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut tujuan penulisan artikel ini adalah untuk (1) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembangunan kawasan PIER (2) mengkaji tentang perkembangan kawasan PIER, (3) mengetahui dampak adanya kawasan industri PIER

2. Pasuruan Industrial Estate Rembang

PIER adalah kawasan industri yang

dikembangkan di Pasuruan. Pembangunan kawasan ini merupakan pengembangan lebih lanjut wilayah industri yang ada di Jawa Timur. Pengembangan kawasan industri pertama kali dilakukan di Surabaya yaitu Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), kemudian disusul dengan Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) dan yang terakhir Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Pengembangan PIER dimulai dengan pembebasan tanah milik petani dan baru tahun 1996 dimulai pembangunan prasarana industri (Purwowibowo, 2004: 29)

Proses pembebasan tanah di kawasan Industrial Rembang Pasuruan (PIER) dimulai tahun 1989, yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah, yaitu: Bupati Kepala Daerah TK II, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Kabag Pemerintahan Daerah TK II, Departemen Pertanian, Kantor Pajak Hasil Bumi, Kecamatan, Kepala Desa, PT SIER (Persero) dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah (HAT) dari BPN sebagai sekretaris. Luas tanah yang dibebaskan di PIER berdasarkan petok. Luas total pembebasan tanah kawasan Industri Rembang Pasuruan (PIER), yang berada di dalam maupun di luar kawasan, terdiri atas 6 desa dan data pembebasan tanah sesuai petok D adalah 5.184.986,00 m² (Lahan Industri di Rembang/PIER), 4) Proses pembebasan tanah dilakukan sejak 1989 sampai 2005. Hasil dari pembebasan tanah di kawasan industri PIER adalah 500 ha. Dari 500 ha luas lahan, 70% dialokasikan sebagai area industri dan 30% untuk area publik.

Setelah dilakukan pengukuran tanah atas Hak Pengolahan Lahan (HPL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka hasilnya, tanah yang sudah ber-HPL seluas 3.570.208,00 m² dan tanah yang belum ber-HPL seluas 1.377.691 m², sedangkan tanah yang berada di luar kawasan adalah seluas 29.321,00 m².

Para investor dalam menanamkan modalnya tentu telah melakukan beberapa pertimbangan, seperti penentuan tempat, penentuan lahan, sarana pendukung yang meliputi infrastruktur dan keamanan lokasi. Hal itu mereka lakukan dengan cara observasi lapangan secara langsung dan bertanya kepada teman yang lebih dahulu menanamkan modalnya di PIER, setelah itu baru mereka bertanya kepada pihak atau karyawan di kantor pemasaran PIER. Penentuan lokasi

kawasan industri PIER didasarkan pada peta peruntukan lahan yang sudah tertulis di Dinas Tata Ruang (Wawancara dengan Sudarto 22 Juli 2013, di Pasuruan). PIER bukan hanya sekedar kawasan industri biasa, karena di dalamnya terdapat kawasan berikat (SIER, 3).

Industri pertama yang berdiri di kawasan PIER adalah PT Welcome Nusantara. Industri ini beroperasi sejak tahun 1993. Setelah itu mulailah bermunculan pengusaha-pengusaha yang menanamkan modalnya di kawasan industri PIER.

Pembukaan kawasan PIER menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sekitar lokasi. Mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Kelompok masyarakat yang kontra pada umumnya adalah para petani yang terkena dampak langsung oleh pendirian kawasan PIER. Mereka menolak pendirian kawasan industri ini dengan alasan selain karena mereka kehilangan lahan pertanian yang selama ini merupakan sumber ekonomi keluarga mereka, mereka juga mengkhawatirkan terjadinya dampak lain, misalnya polusi atau mungkin khawatir adanya limbah dari industri tersebut. Wujud dari penolakan tersebut adalah perlawanan terhadap pembukaan kawasan industri ketika kawasan ini dibuka pada tahun 1992. Mereka mengadakan demo besar-besaran menolak pembangunan kawasan industri, atau sabotase. Akibat dari aksi-aksi yang mereka lakukan kawasan tersebut menjadi tidak aman. Demonstrasi dan sabotase ini tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah maupun pengembang. Hal ini terbukti, meskipun mereka menolak pembangunan tetapi diteruskan (Purwowibowo, 2004: 35).

Pemerintah maupun pengembang berkeyakinan bahwa penolakan mereka hanya bersifat sementara dan masyarakat yang mendukung lebih banyak dibanding yang menolak. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat sekitar kawasan PIER yang berusaha menerima adanya pendirian kawasan tersebut. Mereka bahkan menggantungkan hidupnya terhadap industri karena mereka menganggap keberadaan PIER dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik lagi.

Sikap warga tersebut ternyata tidak permanen. Mereka berubah sikap seiring dengan berjalannya waktu. Pada saat itu mereka hanya

berpikiran bahwa adanya industri di wilayah mereka hanya akan dapat mencemari lingkungan, namun setelah dibangun kawasan industri PIER dan melihat perkembangannya maka mereka mulai merasakan kontribusi keberadaan PIER terhadap kehidupan mereka. Salah satu kontribusinya adalah terserapnya tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat bahwa, setelah pengembangan PIER berjalan 5 tahun. Mereka sudah bisa menerima kebijakan pengembangan kawasan industri meskipun mereka harus kehilangan tanah yang sebenarnya merupakan gantungan hidup mereka. Mereka bahkan berusaha beradaptasi dengan keberadaan industri tersebut (Purwowibowo, 2004: 36-42).

Kawasan industri PIER jika dilihat dari pengusaha yang menanamkan modalnya, didominasi oleh pengusaha dari Jepang. Hal ini terkait dengan kesan dan anggapan mereka bahwa selain letak Pasuruan yang sangat strategis, dan aman, wilayah ini dilalui oleh jalan tol, berdekatan dengan Surabaya, juga fasilitas yang tersedia dalam kawasan industri PIER, misalnya tersedianya pusat pengolahan air limbah, pembuangan sampah, keamanan, pemadam kebakaran, PLN, gas, jaringan telepon, bank, masjid, kontraktor, serta fasilitas olahraga yang berupa lapangan tenis, lapangan sepak bola dan *club house*. Pusat pengolahan air limbah letaknya di sebelah kiri *double way*.

Kawasan industri PIER Rembang dibuka mulai tahun 1992. Industri pertama yang bergabung dalam kawasan ini adalah PT Welcome Nusantara yang memproduksi plastik. Industri ini milik pengusaha dari Hong Kong dan mulai berproduksi pada tahun 1993. Seperti sudah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pengembangan kawasan PIER menggunakan tanah dari beberapa desa yang letaknya tepat dengan rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Letak geografis dari masing-masing desa tersebut bisa dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 1 PIER Industrial Area Map
Sumber: Industrial Estate, SIER.

Peta di atas menunjukkan bahwa kawasan industri PIER berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Kraton. Pembangunan kawasan ini menyebabkan 16 petani belum termasuk tanah milik desa, sudah dibeli oleh para investor seluas 500 ha dan dijadikan sebagai kawasan industri sehingga terkena dampak langsung dari industrialisasi yang terjadi di kawasan Rembang ini.

Luas total pembebasan tanah kawasan industri Rembang Pasuruan (PIER) sampai tahun 2005 sesuai petok D adalah 5.184.986,00 m². Luas tanah yang sudah atas Hak Pengolahan Lahan (HPL) adalah 3.570.208,00 m² dan yang belum ber-HPL termasuk tanah yang berada di luar kawasan adalah 1.407.012,00 m². Luas tanah untuk penggunaan tanah industri termasuk tanah fasilitas umum adalah 1.569.015,78 m². Luas tanah di luar kawasan adalah 28.036,85 m². Tanah yang belum dibebaskan berada di Desa Curahdukuh terdiri dari 3 bidang dengan total luas 35.922,00 m². Beberapa bidang tanah di dalam kawasan yang belum ber-HPL antara lain berada di Desa Pandean, untuk saluran air hujan tersier dan makam serta sebagian besar berada di Desa Curahdukuh. (Kawasan Industri Rembang (PIER), 40).

Dunia industri pasca produksinya pasti

menghasilkan apa yang dinamakan limbah. Limbah di kawasan industri PIER ditangani secara khusus, karena di sana terdapat pusat pengolahan yang jauh dari pemukiman warga. Sebagian besar limbah dari beberapa industri di kawasan PIER berupa limbah air. Limbah air ini diolah terlebih dahulu sebelum dibuang supaya tidak mencemari lingkungan sekitar.

Pengolahan air limbah di kawasan PIER menggunakan sistem pengolahan biologis tanpa menggunakan bahan kimia apa pun. Tersedianya pengolahan air limbah ini digunakan untuk mengatasi dampak negatif yaitu menghindari pencemaran air, tanah dan udara. Hasil dari pengolahan limbah tersebut diolah dan dijadikan pupuk. Semua perusahaan yang berada dalam kawasan PIER limbahnya dialirkan ke pusat pengolahan air limbah tersebut dengan menggunakan pipa yang telah disusun bercabang dan dimasukkan ke dalam tanah.

3. Kontribusi PIER Terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Keberadaan kawasan industri PIER ini menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dampak PIER tersebut berupa perubahan fisik maupun non fisik. Dampak yang bersifat fisik misalnya perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dan perkembangan sarana dan prasarana. Sementara dampak non fisik misalnya perubahan budaya masyarakat sekitar tempat industri.

Faktor pendorong bagi penduduk desa untuk berbondong-bondong meninggalkan desa disebabkan oleh banyak dibangunnya perumahan dan kos-kosan di sekitar kawasan PIER. Peningkatan jumlah industri di kawasan industri PIER, menyebabkan pemerintah berusaha menambah pembangunan tempat tinggal seperti perumahan dan kos-kosan. Perpindahan masyarakat tersebut juga disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian, seiring bertambahnya penduduk.

Keberadaan kawasan industri tentu berpengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh tersebut bisa berupa polusi udara, limbah, masalah kesehatan dan alat-alat berbahaya. Namun lain halnya dengan kondisi di daerah kawasan industri PIER. Di kawasan PIER limbah ditangani dengan

baik. Limbah dari berbagai industri di kawasan tersebut dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian diolah untuk dijadikan pupuk atau yang lainnya. (Wawancara dengan Sudarto, 16 Desember, 2013 di Pasuruan)

Dampak adanya kawasan industri PIER ini telah membuka banyak peluang kerja, diantaranya menjadi tukang ojek, membuka tempat reparasi motor, membuka pertokoan dan kos-kosan.

Kontribusi PIER termasuk sumbangan terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 1996 menunjukkan sebanyak 3.937.880.000, sedangkan tahun 2007 sebanyak 68.350.871.105 (BPS: 2007, 319) Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah PAD dari tahun 1996 ke 2007 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh bertambahnya jumlah industri di kawasan PIER, sehingga menambah pendapatan daerah. Peningkatan jumlah industri tersebut akan menarik beberapa investor untuk menanamkan modalnya. Walaupun sumbangan terbesar bukan dari kawasan PIER, tetapi PIER tetap menjadi bagian dari hasil pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan.

Adanya kawasan industri PIER mengakibatkan ketiga kecamatan (Rembang, Bangil dan Kraton) mengalami peningkatan jumlah penduduk jika dibandingkan dengan sebelum adanya kawasan PIER pada tahun 1991. Pada tahun tersebut jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan adalah 65.970 menjadi 85.169 pada tahun 2007 Kecamatan Bangil, 45.066 menjadi 57.878 pada tahun 2007 Kecamatan Rembang dan 60.341 menjadi 87.837 pada tahun 2007 Kecamatan Kraton (Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, 1991 dan 2007).

Dari studi lapangan diperoleh informasi hanya sedikit sekali pendatang yang bekerja di kawasan PIER bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut. Mereka justru banyak yang tinggal di Pasuruan, Bangil dan Kraton. Pertimbangan fasilitas yang kurang memadai seperti transportasi dan fasilitas umum lainnya menjadi masalah bagi para pendatang Purwobowowo, 2004: 33)

Pembangunan kawasan industri PIER sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan perubahan terhadap kehidupan

masyarakat. Perubahan tersebut meliputi kontribusi pembangunan industri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar industri. Kontribusi pembangunan industri terhadap aspek sosial ekonomi adalah adanya diversifikasi mata pencaharian penduduk tidak hanya menggantungkan pada sektor pertanian, tetapi bervariasi meliputi sektor industri dan perdagangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dengan adanya kawasan industri ini telah membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat Pasuruan, karena terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Kesempatan kerja tersebut tidak hanya bekerja di kawasan industri, tetapi juga bisa dengan membuka warung dan menjadi tukang ojek. Banyaknya jumlah pemakai kendaraan bermotor maka hal itu memotivasi masyarakat untuk membuka tempat reparasi seperti bengkel. Bengkel tersebut bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang sangat mendukung bagi perekonomian mereka. Tentu tidak hanya pengendara sepeda motor yang bekerja di bidang industri saja yang mereparasikan motornya di sana, tetapi yang tidak bekerja di bidang industri juga bisa mereparasikan sepeda motornya di sana, maka pendapatan yang mereka dapatkan akan lebih besar lagi (Penelitian di lapangan 22 Desember 2013).

Pengaruh terhadap aspek sosial budaya antara lain berkurangnya kekuatan mengikat nilai dan norma budaya yang ada karena masuknya nilai dan norma budaya baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang. Hal itu bisa dilihat pada masyarakat sekitar kawasan industri PIER yang mempunyai tradisi slametan dan rasa gotong royong (membangun rumah dengan menggunakan jasa orang atau bayar). Hal itu mulai terkikis karena mereka mulai menyerap budaya masyarakat industri yang lebih berpikir logis dan tidak percaya akan hal-hal mistis. Kontribusi lain adanya kawasan ini adalah terciptanya keanekaragaman kehidupan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya ada yang bekerja sebagai penjual makanan, membuka pertokoan dan membuka kosa-kosan.

Keberadaan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) dan daerah-daerah industri baru

di kawasan *hinterland* menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah kawasan industri dan sekitarnya. Untuk mendukung hal itu telah diupayakan infrastruktur yang memadai, baik sarana transportasi maupun sarana pendukung lainnya. Dalam bidang transportasi darat, dilakukan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar arus lalu lintas. Jalan merupakan salah satu sarana transportasi darat yang sangat penting guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perekonomian (BPS, 2007). Pembangunan jalan meliputi Jalan Nasional, Jalan Propinsi (lokal) dan Jalan Provinsi (kolektor). Jalan Nasional tahun 1991 sepanjang 78,851 km pada tahun 2007 sudah mencapai 97,940 km. Jalan Propinsi (lokal) pada tahun 1991 10,101 km, tahun 2007 sepanjang 35,490 km, sedangkan jalan propinsi kolektor tahun 1991 sepanjang 82,472 km, pada tahun 2007 menyusut menjadi 52,560 km (BPS, 1991-2007). Penyusutan ini disebabkan jalan propinsi baik lokal maupun kolektor ditingkatkan menjadi jalan nasional, berkaitan dengan peningkatan volume kendaraan dan beban yang diangkut kendaraan,

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang semakin canggih, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memanfaatkan teknologi internet dengan merintis portal informasi yang dapat diakses melalui www.pasuruan.kab.go.id. Informasi tentang daerah kawasan industri PIER juga bisa diakses dengan menggunakan teknologi internet melalui www.SIER-PIER.com.

Perkembangan industri di Kabupaten Pasuruan juga bisa dilihat pada jumlah listrik masuk desa. Listrik masuk desa, mulai dari listrik yang dibangkitkan, didistribusikan hingga jumlah pelanggan mulai tahun 1996-2007 mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena adanya kawasan industri PIER, sehingga banyak dibutuhkan tenaga listrik untuk mendukung kawasan industri tersebut. Peningkatan jumlah pelanggan dapat dilihat pada tahun 1996, pelanggan berjumlah 109.780, tahun 2002: 217.775 dan tahun 2007: 5.565.633 pelanggan (BPS, tahun 1996, 2002 dan 2007).

Pengaruh lain adanya kawasan industri PIER juga adalah perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan

mulai tahun 1991-2007 mengalami peningkatan seperti rumah sakit, puskesmas dan posyandu. Hal ini dapat dilihat pada data dari tahun 1991-2007. Pada tahun 1991 terdapat 1 RS Pemda, 4 RS Swasta, 1 Puskesmas dengan perawat 8, Puskesmas Pembantu 31, sementara tahun 2007 RS Pemda 1, Puskesmas dengan perawat 33 dan Puskesmas Pembantu 72 (BPS, 1991 dan 2007). Hal itu menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan semakin banyak karena salah satu alasannya adalah adanya kawasan industri PIER yang memicu peningkatan jumlah penduduk dan pekerja, sehingga perlu didirikan rumah sakit-rumah sakit dan sarana kesehatan lain.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana juga dapat dilihat pada pembangunan tempat-tempat wisata. Sampai tahun 2007, di Pasuruan sudah ada beragam tempat wisata seperti Ranu Grati, Gunung Bromo, Taman Safari Indonesia dan Kebun Raya Purwodadi. Untuk menunjang peningkatan pembangunan tempat wisata, juga dibangun hotel, baik hotel berbintang maupun non berbintang, yang dapat menampung masyarakat baik domestik maupun manca negara. Data yang ada tahun 2007 di Pasuruan sudah ada 7 Hotel Berbintang dengan jumlah kamar 527, hotel, Hotel Melati 30 buah dengan jumlah kamar yang tersedia 1057 kamar, Villa 98 dengan 456 kamar dan Pondok Wisata 41 dengan jumlah kamar 96. (BPS, 2007).

Kontribusi lain dari adanya kawasan industri PIER bisa dilihat pada perkembangan pendidikan. Jumlah sekolah di 3 kecamatan yang ditempati PIER mengalami perkembangan pendidikan yang pesat. Perkembangan jumlah sekolah SD sampai SMA mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 1991 sebelum adanya kawasan industri PIER, SD di Kecamatan Bangil, Rembang dan Kraton masing-masing 41, 31 dan 35 buah, sedangkan pada tahun 2007 SD di 3 kecamatan tersebut masing-masing 35, 30 dan 29 (BPS, 1991 dan 2007). Hal itu jelas terlihat bahwa pada tahun 2007 mengalami penurunan. Namun demikian pada tingkat SLTP dan SLTA mengalami peningkatan karena dengan adanya beberapa industri ini menjadikan masyarakat Pasuruan mampu untuk menyekolahkan anaknya. Hal itu disebabkan pendapatan mereka yang lebih baik dari sebelumnya.

Sekolah SMK, sebelum adanya PIER, tidak

terlalu diprioritaskan, bahkan pada tahun 1991 tidak ditemukan data tentang keberadaan sekolah SMK. Setelah adanya kawasan industri PIER, sekolah SMK mulai diprioritaskan karena hal itu untuk mencetak generasi siap kerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pembukaan PIER merupakan kebijakan lebih lanjut dari industrialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, (2) Pembukaan PIER ternyata tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat sekitar lokasi pembukaan pusat industri tersebut. Hal itu bisa dilihat dari adanya protes dari masyarakat sekitar. Akan tetapi bagi pemerintah PIER dapat meningkatkan *income* Pasuruan, (3) Keberadaan PIER juga dapat dilihat dampaknya pada adanya perkembangan kota. Hal ini bisa kita lihat dari bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan khususnya di 3 kecamatan. Di ketiga kecamatan terjadi penyempitan lahan pertanian karena pembangunan perumahan-perumahan. Dampaknya juga terasa dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat di ketiga kecamatan yang menjadi kawasan industri, selain dampak lingkungan dan berubahnya tata ruang kota.

Daftar Pustaka

Buku

Booth, Anne. *The State and Economic Development in Indonesia: The Ethical and New Order Eras Compared*. Mimeo, 1987.

Burger, D. H. *Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesia II*. Amsterdam, 1975.

Thee Kian Wie. *Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1994.

Terbitan Khusus.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 1991* Pasuruan: BPS. 1992

Badan Pusat Statistik (BPS). *Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2007*. Pasuruan: BPS. 2007.

Kawasan Industri Rembang (PIER) – Pasuruan.

Lahan Industri di Rembang – Pasuruan (PIER).

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Draft Fakta&Analisa*. Pasuruan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2004.

SIER, *Industrial Estate*. Surabaya: SIER.

Skripsi, Laporan Penelitian

Purwowibowo dan Surya Kusuma, Maulana. *Dampak Pengembangan Industri Terhadap Keputusan Petani (Studi Kasus: Di Kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang)*. Jember: Lemlit Universitas Jember. 2004.

Internet

Pasuruan Industrial Estate Rembang. [online] dalam http://pier-pasuruan.blogspot.com/2011/02/visi-dan-misi_23.html., diunduh pada 19 Oktober 2012.

Wawancara

Sudarto, 16 Desember 2013, Pasuruan.